

Penerapan E-Government Berbasis Website Pada Kelurahan Rimba Sekampung Kabupaten Bengkalis

Humayra Aulia¹ Evi Zubaidah²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia.

humayraaulia@student.uir.ac.id evizubaidah@soc.uir.ac.id

Received : 13 Juni 2025

Abstract

The SI LATO BIRU website is an E-Government innovation implemented by the Rimba Sekampung Village to make it easier for the public to access administrative services online. This study aims to see to what extent this policy is able to answer the public's need for fast and easily accessible services. This study uses a Qualitative method with Descriptive analysis techniques with informants, namely the Project Leader and Operator of the SI LATO BIRU website and the community who use the SI LATO BIRU website. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of the study concluded that the Support Element shows that the village has a clear regulatory basis through Regent Regulation No. 63 of 2022 and support from the Bermasa Program, and has carried out socialization even though the socialization carried out has not been optimal and comprehensive due to the low digital literacy of the community. In the Capacity Element, it shows that this website is supported by an adequate budget from the Bermasa Fund, but the limited human resources where only one website operator can be an obstacle to service effectiveness. Meanwhile, the Value Element shows that the SI LATO BIRU website is considered capable of providing benefits and convenience and efficiency in services, as well as building public trust with transparency of information and direct assistance from the sub-district.

Keywords: Implementation, E-Government, Website, SI LATO BIRU

Abstrak

Website SI LATO BIRU merupakan inovasi E-Government yang diterapkan oleh Kelurahan Rimba sekampung untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi secara online. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan mudah di akses. penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif dengan informan yaitu Project Leader dan Operator website SI LATO BIRU serta masyarakat yang menggunakan website SI LATO BIRU. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa dalam Elemen *Support* menunjukkan bahwa kelurahan telah memiliki dasar regulasi yang jelas melalui Peraturan Bupati No.63 Tahun 2022 dan dukungan dari Program Bermasa, serta telah melakukan sosialisasi meskipun sosialisasi yang dilakukan belum optimal dan menyeluruh akibat rendahnya literasi digital masyarakat. Pada Elemen *Capacity*, menunjukkan bahwa website ini didukung oleh anggaran yang memadai dari Dana Bermasa, namun masih terbatasnya SDM yang dimana hanya satu operator website yang bisa menjadi kendala dalam efektivitas layanan. Sementara pada Elemen *Value* menunjukkan bahwa website SI LATO BIRU dinilai mampu memberikan manfaat dan kemudahan dan efisisensi dalam pelayanan, serta membangun kepercayaan masyarakat dengan adanya transparansi informasi dan bantuan langsung dari pihak kelurahan.

Kata Kunci : Penerapan, E-Government, Website, SI LATO BIRU

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan kemajuan informasi yang pesat ini pemerintah dituntut untuk lebih responsif, transparan dan efisien dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan mengembangkan konsep digital, yaitu penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik atau yang di kenal dengan *E-Government*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta diperkuat oleh Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan *E-Government* yang pada intinya membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Penerapan *E-Government* memiliki beberapa manfaat dalam penerapannya seperti untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas instansi pemerintahan dalam memberikan informasi dan pelayanan publik, mengurangi biaya transaksi dalam layanan administrasi, meningkatkan respon terhadap berbagai permasalahan dan pertanyaan atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah, serta *E-Government* dapat meningkatkan tercapainya *Good Governance* dalam hal peningkatan tranparansi, akuntabel dan demokratis.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengembangkan sistem E-Government ini melalui Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bengkalis. Salah satu bentuk dari implementasinya adalah dengan membuat inovasi *E-Government* berbasis website <https://www.kelurahanrimbasekampung.com/> yang bernama SI LATO BIRU atau Sistem Pelayanan Administrasi Online dan Berita Terbaru sebagai wujud dari kebijakan penerapan *E-Government*. Website ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi secara online, seperti pengajuan surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan lainnya, serta layanan pengaduan.

Seiring dengan penerapan SI LATO BIRU yang disediakan oleh Kelurahan Rimba Sekampung Kabupaten Bengkalis, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan yang disediakan terus meningkat, berikut jumlah surat online yang terdaftar sejak Januari 2023 – September 2024 pada website kelurahan :

Tabel 1

Jumlah Surat Online yang terdaftar sejak Januari 2023 - September 2024 pada website SI LATO BIRU Kelurahan Rimba Sekampung Kabupaten Bengkalis

NO	Jenis Surat	Jumlah
1.	Surat Keterangan Domisili	66
2.	Surat Keterangan Kematian	3
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	338
4.	Surat Keterangan Usaha	256

5.	Surat Keterangan Pengantar Nikah	40
6.	Surat Keterangan Domisili Kantor/Perusahaan	0
7.	Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua	4
8.	Surat Keterangan Tidak Mampu Beasiswa	19
9.	Surat Keterangan Tidak Mampu BPJS	10
Jumlah		736

Sumber: Data Kelurahan Rimba Sekampung

Berdasarkan tabel diatas tercatat sebanyak 736 pemohon surat yang telah di ajukan secara online sejak Januari 2023 hingga September 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan *E-Government* oleh masyarakat. Namun dalam penerapan website SI LATO BIRU ini tidak selalu berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam penerapannya, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pembuatan surat secara online. Banyak masyarakat yang belum familiar dengan cara penggunaannya kurangnya pemahaman ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai cara mengakses dan menggunakan layanan online yang disediakan oleh kelurahan. Sebagian besar masyarakat masih terbiasa dengan prosedur manual dalam mengurus administrasi, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa pembuatan surat-surat tersebut bisa dilakukan secara online dengan lebih cepat dan efisien.

Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut World Bank Group dalam Indrajit (2002:3) mendefinisikan pengertian *E-Government* yaitu, *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi (jaringan area luas, Internet, komputasi mobile, dll.) oleh lembaga pemerintah yang mampu berkomunikasi dengan warga negara, perusahaan, dan organisasi lainnya.

Penerapan *E-Government* merupakan suatu media dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan aktivitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Peningkatan kemampuan yang dilakukan aparatur pemerintah

dalam penerapan *E-Government* selalu dikembangkan agar mampu dan dapat bersaing di tengah persaingan global.

Suksesnya pengembangan *E-Government* bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK School of government meliputi *support* (dukungan), *Capacity* (kemampuan), dan *Value* (nilai). Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dukungan/*Support* adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur "*political will*" dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* akan sulit berjalan. Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungan verbal semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk:
 - a. Disepakatinya kerangka *E-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan.
 - b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
 - c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-Government*.
 - d. Disosialisasikannya konsep *E-Government* secara merata, berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh kepada seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang simpatik.
2. Kemampuan/*Capacity* adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan *E-Government* menjadi kenyataan. Suatu inovasi perlu memperhatikan kesesuaian inovasi dengan inovasi sebelumnya. Dalam atribut *compability* (kesesuaian), yang dimana sebuah inovasi harus memiliki sifat kesesuaian dengan yang digantinya. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplentasikan dan membangun *E-Government*, yaitu :
 - 1.Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial
 - 2.Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E- Government*
 - 3.Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3. Nilai/*Value* : Elemen pertama dan kedua adalah dari sisi supply (pemerintah ke penyedia layanan), dan yang ketiga (*Value*) dari sisi permintaan. Berbagai inisiatif *E-Government* tidak ada gunanya jika tidak dipandang bermanfaat bagi salah satu pihak. Salah satunya penerapan konsep ini, besar kecilnya manfaat yang diperoleh dari *E-Government* ditentukan oleh masyarakat dan pihak yang mempunyai kepentingan (*demand side*), bukan pemerintah itu sendiri. Elemen nilai atau *value* berfokus pada hasil yang diharapkan dari penerapan *E-Government*. Dalam kaitannya dengan elemen *value* dalam penerapan *E-Government* kepercayaan publik terhadap layanan *E-Government*, yang dimana keyakinan awal diperlukan dalam hubungan warga negara yang belum memiliki informasi yang bisa dipercaya tentang penyediaan layanan elektronik (Mcknight et al., 2002).

Pemanfaatan *E-Government* merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kapasitas negara sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan kapasitas PNS dalam penerapan *E-Government* terus dikembangkan agar mampu bersaing dalam persaingan global.

Penerapan *E-Government* menghendaki perubahan pola relasi antara pemerintah dengan stakeholder sehingga sangat membutuhkan peran top level manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap transformasi relasi tersebut. Transformasi relasi akan membutuhkan perubahan kebijakan, perubahan SOP, dan perubahan pada budaya kerja. Oleh sebab itu dalam penerapan *E-Government* memerlukan figur pemimpin yang mampu memiliki kemampuan dalam mengadopsi TIK dalam menjalankan organisasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Rimba Sekampung, Kabupaten Bengkalis yang dipilih secara purposif karena telah mengimplementasikan inovasi *E-Government* berbasis website melalui program SI LATO BIRU, yang digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan yang relevan terkait penerapan *E-Government*, termasuk proses pelaksanaan, hambatan serta respon Masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang di ambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti yang di ambil melalui sebuah wawancara dan juga melakukan observasi kepada informasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Lurah Rimba Sekampung selaku *Project leader*, Operator Website SI LATO BIRU, serta Masyarakat yang menggunakan website SI LATO BIRU.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dan analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam penerapan bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen

sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard *JFK School of government* meliputi :

1. Dukungan/*Support*

a) Adanya regulasi yang jelas

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dianalisis bahwa, meskipun pihak kelurahan Rimba Sekampung memiliki dasar atau regulasi yang jelas dalam pelaksanaan program E-Government melalui website SI LATO BIRU, seperti yang tercantum dalam PERBUP No 63 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ataupun program bermasa dari bupati, namun implementasi di tingkat masyarakat belum sepenuhnya optimal yang dimana berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Masyarakat belum mengetahui secara jelas terkait regulasi atau kebijakan yang mendasari penggunaan website.

b) Adanya sosialisasi terhadap konsep E-Government

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwasannya, pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi mengenai penggunaan website, baik melalui pihak RT atau RW maupun secara langsung kepada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan. Namun, dalam penerapannya masih belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, terutama warga lanjut usia. Dalam kondisi demikian, pihak kelurahan tetap memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat dalam mengakses dan menggunakan website tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen kelurahan dalam memfasilitasi pelayanan publik berbasis digital meskipun tantangan literasi digital masih menjadi hambatan.

2. Kapasitas/*Capacity*

a) Ketersediaan sumber daya anggaran yang cukup

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwasannya, mengenai anggaran yang digunakan dalam penerapan website ini menggunakan dana bermasa yang dimana pada dana bermasa ini digunakan sebagian untuk menyediakan dan melengkapi infrastruktur yang disediakan, dan dengan adanya website ini dapat memudahkan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan.

b) Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwasannya, pelaksanaan website SI LATO BIRU ini sudah berjalan dengan baik serta mendapat respon positif dari masyarakat. Pihak kelurahan juga aktif membantu dan membimbing masyarakat, khususnya bagi Masyarakat yang belum memahami penggunaan website tersebut. Namun, keterbatasan SDM menjadi kendala, karena hanya satu orang yang menangani atau menjadi operator website, sehingga pelayanan kurang optimal saat keadaan ramai.

3. Nilai/*Value*

a) Memudahkan Masyarakat dalam pelayanan

Berdasarkan hasil Dari hasil observasi yang dilakukan di Kelurahan Rimba Sekampung, dapat diketahui bahwa keberadaan layanan website SI LATO BIRU memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti pembuatan surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, dan dokumen penting lainnya. Masyarakat yang telah mencoba layanan ini menyatakan bahwa proses pengajuan surat menjadi lebih cepat, praktis, dan tidak perlu mengantre langsung di kantor kelurahan.

b) Adanya kepercayaan public (*public trust*)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa penerapan layanan digital SI LATO BIRU di Kelurahan Rimba Sekampung memperoleh respon positif dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterbukaan informasi, kemudahan akses layanan, serta testimoni dari masyarakat lain yang telah merasakan manfaatnya. Masyarakat yang telah menggunakan website tersebut mengakui bahwa pelayanannya cepat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sementara itu, bagi masyarakat yang belum pernah mencoba, kepercayaan mulai tumbuh seiring adanya informasi yang disampaikan dengan baik dan pengalaman positif dari warga lainnya

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan penelitian terkait Penerapan E-Government Berbasis Website Pada Kelurahan Rimba Sekampung Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan capaian positif pada tiga elemen penting, yaitu *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Dalam elemen *support*, Kelurahan Rimba Sekampung telah memiliki dasar regulasi yang jelas melalui Peraturan Bupati No.63 Tahun 2022 serta dukungan dari program Bermasa, dan telah melakukan sosialisasi meskipun masih belum sepenuhnya efektif karena masih rendahnya literasi digital masyarakat setempat khususnya lansia. Pada elemen *capacity*, program website SI LATO BIRU didukung oleh anggaran yang memadai dari Dana Bermasa, namun masih terdapat keterbatasan SDM yang dimana hanya satu operator website yang dapat berdampak pada efektivitas layanan saat permintaan surat meningkat. Sementara itu, dalam elemen *value*, website ini dinilai memberikan manfaat, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pengurusan surat keterangan secara online, serta website ini mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan bantuan langsung dari petugas, yang dimana mendapat respon positif dari masyarakat terhadap layanan website SI LATO BIRU.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Fuadi, A. I., & Marom, A. (n.d.). *IMPLEMENTATION of E-GOVERNMENT THROUGHT to PUBLIC INFORMATION MEDIA WEB BASED AREA IN THE CITY of TEGAL.*

- Heriyanto. (n.d.). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. In *Musamus Journal Of Public Administration*. 2022.
- Program, A. W., Manajemen, S., Keimigrasian, T., & Imigrasi, A. P. (2024). LITERATURE REVIEW: EFFECTIVENESS OF WEBSITE-BASED E GOVERNMENT APPLICATIONS LITERATURE REVIEW: EFEKTIVITAS APLIKASI E-GOVERNMENT BERBASIS WEBSITE. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 7(3).
- Rachma Aprianty, D. (2016). PENERAPAN KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA. 4(4), 1589–1602.
- Syaputra Sekolah Tinggi Teknologi Pagaram, A. (2021). *Aplikasi E-Kelurahan untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi dalam Mendukung Penerapan E-Government E-Kelurahan Application for Administrative Service Improvement in Supporting E-Government Implementation*. 20(2), 379–388. <https://doi.org/10.30812/matrik>
- Zaliluddin, D., Rully, A., Informatika, J., Teknik, F., Majalengka Jalan Abdul Halim No, U. K., & Barat, J. (2020). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BERBASIS ANDROID. *Sistem Informasi* 1, 7(2), 83–88.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., Anugrah, E., & Fakultas,). (n.d.). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (*Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng*).
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Amar Yusron, S., & Zubaidah, E. (2024). Penerapan KIR Online Di Kota Pekanbaru. In *Suryandi Amar Yusron dan Evi Zubaidah Journal of Public Administration Review* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar>
- Zubaidah, E., Lubis, E. F., Andry, H., & Khadijah, A. P. (2023). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA LAYANAN RED ROSE DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Trias Politika*, 7(1), 157-166.
- Fikri, R., Faisal Amrillah, M., Selwa, H., Rivai, A., & Riau, U. I. (n.d.). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBSITE DI DESA PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS WEBSITE-BASED VILLAGE INFORMATION SYSTEM IMPLEMENTATION IN PEDEKIK VILLAGE, BENGKALIS DISTRICT, BENGKALIS REGENCY. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 4(2), 2021. <http://pedekik.desa.id/first>.
- Pandapotan Damanik, M. (n.d.). E-GOVERNMENT DAN Marudur Padapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH E-GOVERNMENT AND ITS APPLICATION IN LOCAL GOVERNMENT (*Case Study Towards Information Quality on Bengkalis Regency Website, Riau Province*) Erisva Hakiki Purwaningsih.

PARADIGMA Jurnal Pengabdian Masyarakat PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT DI DESA BEJI KABUPATEN BANYUMAS. (n.d.).

Sanjaya, H., Karimah, S., & Puspitasari, A. (2023). Penerapan E-Government dalam Perspektif Pemanfaatan E-Government Pada Kota Surabaya. In *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* (Vol. 1, Issue 1).

Setianingrum, O. K., Sumaryadi, N., Wargadinata, E., & Kota Bandung, P. (n.d.). *PENERAPAN EGOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.*

Susanto, G., Hattab, S., & Guru Besar, D. /. (2024). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TONDO KOTA PALU. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 61–70. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1191>

Yolanda, N. (n.d.). *PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT.*

Sutrisno, A., Sujianto, & As'ari, H. (2023). Evaluasi Penerapan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. *Journal of Community Service and Research*, 13-23.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2012). *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Andry, H., & Yussa, T. (2020). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Indradi, S. S. (2016). *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Indrayani, E. (2020). *e-Government Konsep, Implementasi dan Perkembangan di Indonesia*. Sumatra Barat: LPP Balai Insan Cendikia.

Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.

Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publlik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. Banten: CV. AA. RIZKY.

Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., & dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan:

Lee, N.Y. (2009). *Modul 3 Penerapan E-Government*. APCICT

Masyhur, F. (2014). *Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia*

Indrajit, R.E. (2016). *Konsep dan Strategi Electric Government*.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation

Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special

allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan

- Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi

Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.

- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The

Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogია, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.